

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Audit Pricing Theory*

Audit pricing theory dijelaskan didalam penelitian Simunic (1980) sebagai dasar dalam penentuan biaya audit (*audit fee*). *Audit fee* tersebut diberikan oleh auditor kepada klien sebagai biaya untuk auditor dalam melakukan pekerjaannya. Pengukuran *audit fee* diukur dengan menggunakan kuantitas (Q) dan harga (P), dalam kuantitas tersebut diukur dengan menggunakan jam kerja dari auditor sedangkan harga ditentukan dengan menggunakan *average* dari tingkat penagihan jam kerja hal tersebut dijelaskan oleh Simunic (1980). Terdapat dua sudut pandang yaitu dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Pertama adalah perspektif penetapan harga audit sisi-permintaan yang memiliki hubungan positif antara kualitas tata kelola perusahaan dan biaya audit. (Bell et al., 2015; Redor, 2017) menemukan biaya audit cenderung lebih tinggi dalam menanggapi risiko salah saji yang tinggi dan permintaan audit kualitas yang tinggi oleh tata kelola untuk melindungi modal reputasi mereka. Dewan yang berpengalaman cenderung mencari audit berkualitas lebih tinggi dari auditor eksternal; ini mendorong auditor untuk membebankan biaya yang lebih tinggi (Mitra et al., 2019). Permintaan audit adalah fungsi dari serangkaian risiko yang dihadapi oleh pemangku kepentingan organisasi dan kumpulan mekanisme kontrol yang tersedia untuk mengurangi risiko ini (Simunic, 1980). Sedangkan yang kedua adalah perspektif sisi penawaran menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara kualitas tata kelola perusahaan dan biaya audit. Kontrol yang lebih ketat dan lingkungan tata kelola dapat mengurangi penilaian auditor terhadap risiko pengendalian, dan tingkat prosedur audit, sehingga mengurangi biaya audit (Wahab et al., 2011)

Simunic (1980) melihat hubungan signifikan dan positif antara kompleksitas klien dan biaya audit eksternal. Hal terjadi karena auditor eksternal akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengaudit dan keahlian yang lebih besar untuk mengaudit ketika perusahaan klien lebih

kompleks daripada perusahaan klien yang kurang kompleks. Cohen et al. (2002) berpendapat bahwa investasi *Aset Tidak Berwujud* (terutama *research and development*) akan sulit untuk dinilai. Lalu juga ada risiko litigasi yang membuat bertambahnya biaya audit eksternal, litigasi adalah proses yang terjadi akibat sengketa atau kasus ke jalur hukum. Aset Tidak Berwujud, seperti paten dan hak cipta dapat dirambah oleh orang lain, bahkan secara tidak sengaja, sehingga menarik perusahaan dan auditor ke dalam proses pengadilan yang panjang dan yang dapat meningkatkan risiko litigasi bagi auditor (Datta & Kulchania, 2019)

Aset Tidak Berwujud memiliki dua aspek tersebut yaitu kompleksitas klien dan risiko litigasi hal ini dikarenakan Aset Tidak Berwujud adalah asset yang susah untuk dihitung dan ditentukan nilainya (Visvanathan, 2017), yang akan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha dari auditor eksternal untuk bekerja dan selain itu juga dapat menambah risiko litigasi dengan semakin banyaknya proporsi *Aset Tidak Berwujud* dalam laporan keuangan (Simunic, 1980).

2.2. Audit Fee

Audit fee (imbalan jasa) adalah seluruh imbalan atas jasa yang dibayarkan kepada auditor oleh suatu perusahaan atas jasa audit yang dilakukan. Besarnya *audit fee* dipengaruhi oleh ukuran perusahaan klien, kompleksitas audit, dan risiko audit. (Simunic, 1980). Menurut Ettredge, Fuerherm, dan Li (2014) diperlukan yang lebih tinggi untuk memastikan upaya yang lebih tinggi untuk menghadapi risiko yang lebih tinggi pula.

Kualitas audit yang lebih baik dapat mendeteksi kesalahan lebih banyak dan menghasilkan salah saji yang lebih sedikit. Maka dalam pelaksanaannya, auditor diharuskan melakukan usaha yang lebih besar. Maka dari itu dalam menentukan biaya auditor memerlukan pertimbangan waktu yang tepat dalam menilai resiko perusahaan dan seberapa besar usaha yang dilakukan auditor kedepannya dalam melaksanakan proses audit (Lobo & Zhao, 2013)

2.3. Aset Tidak Berwujud

Menurut Kieso et al (2016) Aset Tidak Berwujud adalah aset yang berbeda dengan aset berwujud, yaitu tidak memiliki bahan atau substansi fisik. Mereka biasanya dibuktikan dengan dokumen hukum. Secara umum ada enam kategori Aset Tidak Berwujud yaitu:

Aset Tidak Berwujud yang terkait dengan pemasaran, contohnya seperti merek dagang. Merek dagang adalah kata, frasa, atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Nama dagang seperti Kleenex, Pepsi-Cola, Buick, Excedrin, Wheaties, dan Sunkist menciptakan identifikasi produk langsung di pikiran kita, sehingga meningkatkan daya jual. Di mata hukum, hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang dimiliki secara eksklusif oleh pengguna asli.

Aset Tidak Berwujud yang terkait dengan Pelanggan, Contohnya termasuk daftar pelanggan, pesanan atau simpanan produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual ataupun non-kontraktual.

Aset Tidak Berwujud terkait artistic, adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan secara sah yang dimiliki semua penulis, pelukis, musisi, pemahat, dan seniman lain dalam kreasi dan ekspresi mereka. Hak cipta diberikan untuk kehidupan pencipta ditambah 70 tahun. Ini memberi pemilik atau ahli waris hak eksklusif untuk mereproduksi dan menjual karya artistik atau diterbitkan. Hak cipta tidak dapat diperpanjang.

Aset Tidak Berwujud yang terkait dengan kontrak, seperti waralaba. Waralaba adalah pengaturan kontrak di mana pemilik waralaba memberikan hak waralaba untuk menjual produk atau layanan tertentu, untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu, atau untuk melakukan fungsi tertentu, biasanya dalam wilayah geografis yang ditentukan.

Aset Tidak Berwujud terkait teknologi, adalah paten. Sebuah paten memberi pemegang hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual suatu produk atau proses untuk jangka waktu 20 tahun tanpa campur tangan oleh orang lain. Perusahaan seperti Merck, Polaroid, dan Xerox didirikan di atas paten dan dibangun di atas paten ke hak-hak eksklusif.

Terdapat dua jenis paten utama adalah Paten Produk, yang mencakup produk fisik aktual, dan Paten Proses, yang mengatur proses pembuatan produk.

Goodwill. Goodwill adalah selisih lebih dari biaya pembelian di atas nilai wajar dari aset bersih yang dapat diidentifikasi (aset dikurangi kewajiban) yang dibeli. Secara konseptual, goodwill mewakili manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah

2.4. Risk Management Committee

Kemunculan *Risk Management Committee* merupakan salah satu cara bagaimana perusahaan dapat secara efektif mengendalikan risiko dan membantu investor untuk mengetahui risiko perusahaan dengan lebih baik (Linsley dan Shrides, 2006). Keahlian RMC dalam manajemen risiko akan membantu proses komunikasi informasi manajemen risiko antara operasi dan divisi strategis. Misalnya dapat menemukan informasi penting apa yang perlu diperoleh dari divisi operasi (FRC 2011). Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa pengungkapan informasi manajemen risiko penting dalam mengurangi informasi asimetris (Miihkinen, 2013) dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Abdullah et al., 2015). Meskipun demikian, pengungkapan informasi manajemen risiko masih rendah, terutama dalam pengungkapan informasi terkait manajemen risiko non-keuangan; yang merupakan pengungkapan sukarela (Linsley dan Shrides, 2006; Larasati et al., 2019). Keberadaan RMC di dalam perusahaan dapat meningkatkan permintaan audit (meningkatkan biaya) atau mengurangi penilaian risiko auditor (menurunkan biaya) (Carcello et al, 2002).

Sistem tata kelola pada perusahaan modern dibagi menjadi dua bagian, yaitu mekanisme internal dan mekanisme external yang sifatnya beragam tergantung lingkungan tertentu yang dianjurkan (Weir et al., 2000). Indikator mekanisme internal governance terdiri dari jumlah dewan direktur, proporsi dewan komisaris independen, dan debt to equity sedangkan indikator mekanisme external governance terdiri dari institutional ownership (Beiner et al., 2004). Saat kedua mekanisme tersebut berjalan secara bersamaan, maka

sistem tata kelola perusahaan akan membuat manajer memaksimalkan nilai pemegang saham (Nendelstadh & Rosenberg, 2003).

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Aset Tidak Berwujud dan *Audit Fee*

Dalam penelitian Visvanathan (2017) menunjukkan bahwa auditor membebankan biaya yang lebih tinggi untuk perusahaan dengan Aset Tidak Berwujud yang lebih tinggi, karena auditor menilai ini sebagai potensi risiko audit yang lebih tinggi dan memerlukan lebih banyak waktu dan usaha.

Proporsi Aset Tidak Berwujud perusahaan terkait positif dengan biaya audit, kami menemukan bahwa Aset Tidak Berwujud yang tinggi memerlukan upaya auditor yang lebih besar dan risiko litigasi yang lebih besar yang menghasilkan biaya audit yang lebih tinggi. Selain biaya penelitian dan pengembangan, kami menemukan bahwa jumlah paten juga memengaruhi biaya audit. (Datta et al., 2019).

Menurut Soraya & Syafruddin (2013) Pengukuran kinerja pemanfaatan aset, baik yang bersifat tangible maupun yang bersifat intangible perlu dilakukan oleh perusahaan sebagai cara untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Akan tetapi, terdapat kesulitan yang muncul dalam mengukur kinerja pemanfaatan Aset Tidak Berwujud yaitu nilainya yang terkadang sulit diukur. Yang mana akan mempengaruhi waktu dan usaha auditor dalam proses tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Terdapat hubungan positif antara *Aset Tidak Berwujud* dan *Audit Fee*

2.5.2. *Risk Management Committee* dan *Audit Fee*

Peran *Risk Management Commitee* adalah memberikan jangkauan yang lebih luas dari identifikasi risiko di dalam perusahaan

(Aebi et al., 2012). RMC yang berdiri sendiri akan melakukan perannya secara independen dengan komite audit dan dapat bekerja lebih efektif untuk melakukan tanggung jawab mengawasi manajemen risiko (Buckby et al, 2015). RMC memiliki peran sebagai mekanisme tata kelola untuk mengawasi risiko perusahaan dan juga mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan (Nahar et al, 2016). Dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka, RMC harus mengawasi kerangka kerja manajemen risiko organisasi melalui proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi semua risiko masa depan dan saat ini yang tampaknya mengancam keberadaan organisasi (Schlich & Prybylski, 2009). Pembentukan komite manajemen risiko menghadirkan komitmen dan kesadaran dewan tentang pentingnya sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (Cummins et al, 2009). Tata kelola perusahaan yang baik dan komposisi dewan menunjukkan hubungan positif dengan akuntabilitas perusahaan (Tumwebaze et al, 2018)

Knechel dan Willekens (2006) mengemukakan bahwa ketika tingkat kontrol perusahaan tunduk pada kekuatan permintaan internal yang dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan, ini akan menghasilkan peningkatan bersih dalam penjaminan eksternal. Meskipun RMC tidak secara langsung membeli layanan audit, RMC dapat merekomendasikan layanan yang lebih besar sebagai bentuk respons risiko terhadap tugas pemantauan risiko mereka dan dapat mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi untuk jaminan eksternal.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Terdapat hubungan positif antara *Risk Management Committee* dan *Audit Fee*

2.5.3. *Risk Management Committee*, aset tidak berwujud, dan *audit fees*

Berdasarkan konsep teori agensi, RMC memiliki peran dalam memantau kegiatan perusahaan dan memberikan jangkauan yang luas terhadap identifikasi risiko dalam perusahaan (Aebi et al., 2012). RMC juga memiliki peran sebagai mekanisme tata kelola untuk mengawasi

risiko perusahaan dan juga mengkomunikasikan risiko tersebut dengan pemangku kepentingan (Nahar et al., 2016). Keberadaan tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan dapat meningkatkan permintaan audit (meningkatkan biaya) atau mengurangi penilaian risiko auditor (menurunkan biaya) (Carcello et al., 2002).

Namun disini RMC nampaknya memiliki tanggung jawab kepada pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kecurangan. RMC dapat merekomendasikan layanan audit lebih menyeluruh sebagai bentuk respons risiko terhadap tugas pemantauan risiko dan dapat menghasilkan jaminan eksternal yang lebih baik. Perusahaan dengan aset tidak berwujud yang tinggi maka risikonya akan semakin besar dan biaya audit akan menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : *Risk Management Committee* memperkuat hubungan antara Aset Tidak Berwujud dan *Audit Fee*

2.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menggambarkan hubungan antar variable yang disusun berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh Aset Tidak Berwujud terhadap *audit fee* serta pengaruh *Risk Management Committee* Perusahaan terhadap *audit fee*.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

